

Dinamika Hubungan antar Kelompok Kurdi dalam Pendekatan Konstruktivisme

Muchammad Chasif Ascha, Yon Machmudi

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

E-mail: chasifascha@gmail.com, machmudi@ui.ac.id

Abstract

The Kurdistan Regional Government and the Kurdish Workers' Party have experienced different dynamics of the relations compared to before, especially since the Arab Spring until now. The hostility and war that characterized the relations between the two groups shifted to more than rivalry. Even in some conditions they can be involved in cooperation and show a positive attitude. This relations could then be explained in the study of International Relations by treating them as non-state actors who can be studied one of them in the approach of Constructivism. By analyzing the approach, it can be seen that the relations between the two groups underwent reconstruction due to interactions between them and resulted in a different Kurdish relations structure. The dynamics of the relations also show that identity, ideas, values, and language about Kurds are important in the relations process. Through Wendt's international system, it can also be seen how the relations transformed from the Hobbesian, Lockean, and even Kantian systems. Then the 'speech act' seen by the actors in the group shows that discourse related to Kurdish ideas is one of the important factors for the relations between the Kurdistan Regional Government and the Kurdish Workers' Party.

Keywords: Kurdish Groups, Dynamics of Relation, Rivalty, Constructivism

PENDAHULUAN

Selama ini kajian tentang Kurdi kebanyakan berkisar pada studi tentang masyarakat Kurdi atau kelompok Kurdi di suatu wilayah tertentu. Sementara itu kajian bagaimana hubungan antar kelompok Kurdi lintas negara, lebih-lebih dalam kajian Hubungan Internasional, jarang ditemukan. Kajian tentang Kurdi dalam Hubungan Internasional pada umumnya melihat aktor Kurdi dalam hubungannya dengan negara lain.

Sampai kini, hanya Kurdistan di Irak yang mempunyai wilayah resmi yang

diakui sebagai entitas otonom sebagaimana yang ada dalam konstitusi 2005 dengan nama Kurdistan *Regional Government* (KRG). Kelompok Kurdi lainnya yang berasal dari Turki dan mempunyai sejarah panjang dalam perlawanannya bergerilya dalam menentang pemerintahan pusat adalah Partai Pekerja Kurdi (PKK), yang menjadi musuh utama (atau juga sering disebut “musuh tradisional”) pemerintahan Turki, dan juga mempunyai cabang di Rojava (wilayah Kurdi Suriah) yaitu Partai Persatuan Demokratik (PYD) yang didirikan pada tahun 2011 (International

Crisis Grup: 2013). Dua kelompok Kurdi tersebut, yaitu KRG dan PKK, mempunyai hubungan rivalitas atau saling bermusuhan. Hal ini dapat dilacak dari permusuhan yang terjadi antara kedua kelompok kurdi Irak, KDP dan PUK, dengan PKK, yang telah berperang sejak 1991 sampai genjatan senjata pada 2000 (Orhan, 2014).

Rivalitas kedua kelompok Kurdi itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Turki dan sebagai upaya untuk melemahkan PKK, yang juga merupakan musuh dari KRG. Ketika terjadi Arab Spring, permusuhan itu tetap terjadi dan bahkan semakin menyebar di wilayah lain, seperti ketika Nasionalis Kurdi Suriah membentuk *Kurdish National Council* (KNC), PYD bersitegang dengan KNC karena KNC merupakan bentukan dari KDP yang digalang oleh Masoud Barzani (Orhan, 2014). Namun yang menarik ketika mereka sempat duduk bersama dalam Perjanjian Erbil untuk menyamakan pandangan dalam mengatasi permasalahan di Rojava (wilayah Kurdi Suriah), meskipun pada akhirnya kesepakatan itu gagal diimplementasikan. Antara faksi-faksi Kurdi yang selama ini bertikai, terutama KRG dengan PKK-PYD juga melakukan kerja sama dalam memerangi ISIS. Othman Ali (2014) mengatakan bahwa dalam perlawanan terhadap kelompok teror itu, dapat meningkatkan

kemungkinan untuk adanya perang intra-Kurdi, namun nyatanya mereka melakukan kerja sama dan saling membantu. Bahkan Kamal Chomani (2015) mengatakan, hubungan tersebut merupakan pertama kali dalam sejarah modern. Lalu dalam penyerangan Turki di Afrin pada 2018 dan operasi Mata Air di Rojava pada 2019 yang notebene dikuasai kelompok YPG yang menjadi tulang punggung bagi Syrian Democratic Front (SDF), KRG setidaknya memperlihatkan sikap penolakan terhadap ‘invansi’ tersebut dan menunjukkan keprihatinan dan solidaritas terhadap Kurdi di Suriah itu.

Sifat hubungan yang terlihat unik dan cenderung dinamis tersebut menimbulkan sebuah kajian menarik dalam upaya untuk melihat pola struktur interaksi (kekuasaan, ketertiban, rivalitas, dan persahabatan) secara teoretis antar Kurdi terutama antar KRG dan PKK dalam konteks Hubungan Internasional, terutama semenjak perubahan ideologi dalam PKK hingga kini. Dari pembahasan diatas dapat kita munculkan sebuah pernyataan masalah, yaitu, walaupun faksi-faksi Kurdi seperti PKK-PYD dengan KRG (terutama KDP) saling bermusuhan dan berkonflik mulai dari konflik militer hingga konflik pada arena ideologis-politis (dan KRG menjadi sekutu Turki) tetapi mereka pun dalam satu sisi saling membantu dan bersatu dan bahkan saling mengirimkan

masukannya ke wilayah faksi-musuh mereka dalam melawan ISIS. Ketika Rojava mendapat serangan dari Turki, KRG juga menyatakan perhatiannya dan menyerukan untuk penghentian serangan.

Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan menganalisis struktur pola hubungan pada dua kubu yang mempunyai rivalitas, yaitu PKK-PYD di satu sisi, dan KRG di sisi lainnya, menggunakan Konstruktivisme dalam kajian Hubungan Internasional sebagai paradigma analisis. Sedangkan struktur atau sistem dalam Konstruktivisme biasanya menjelaskan dalam jangkauan yang lebih luas secara internasional dan global antara *state actor*. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan persoalan yang ditemukan mengenai hubungan-hubungan antar kelompok Kurdi, maka pertanyaan masalahnya adalah: Bagaimana Konstruktivisme menjelaskan struktur pola hubungan Partai Pekerja Kurdi (PKK) dan Kurdistan Regional Government (KRG) Irak?

Keberadaan kelompok Kurdi dalam perpolitikan di Timur Tengah menjadi menarik sebagaimana yang diungkapkan oleh Gunter (2015), dalam *The Kurds in the Changing Political Map of the Middle East*, bahwa kelompok tersebut membentuk sebuah *post-state entities* yang menggantikan model negara Westphalia. Gunter menyebutkan Kurdi dalam

pernyataannya itu dengan mengkhususkan Kurdi Suriah yang mempunyai daerah kekuasaan di tiga kanton Afrin, Kobane, dan Hasakah/Jezire (wilayah ini disebut *Western Kurdistan* atau Rojava). Oleh karena penguasaan terhadap daerah tersebut, Rojava disebut sebagai bentuk *post-Westphalian states*.

Senada dengan Gunter, seperti yang dikatakan oleh Bozarslan (2014), dengan redaksi yang berbeda dalam *The Kurds and Middle Eastern "State of Violence" the 1980s and 2010s*, bahwa *non-state actors* seperti Kurdi ini menunjukkan keterbatasan model negara Westphalia yang telah lama menjadi sebuah bentuk "negara ideal" di zaman modern ini. Tentunya kedua pernyataan ini seolah menjadi temuan baru mengenai struktur sebuah entitas yang dihasilkan akibat konstelasi dan perubahan perpolitikan di Timur Tengah saat ini.

Dalam literatur lain, terdapat juga yang membahas tentang hubungan antar kelompok Kurdi dilihat dari kajian Hubungan Internasional seperti dalam buku Hannes Cerny (2018) yang berjudul *Iraqi Kurdistan, the PKK and International Relations : Theory and Ethnic Conflict*, seperti dalam penelitian ini nantinya, ia juga menyanggah *state* sebagai aktor utama, seperti dalam paradigma pospositivis lainnya. Ia mengkritik penjelasan dari teori etnik

konflik dan kedaulatan negara seperti yang lazim dilakukan dalam kajian terhadap kelompok etnis seperti Kurdi, tapi dalam pembahasan selanjutnya, yang berbeda dengan penelitian ini, adalah ia menggunakan Dekonstruksi, sedangkan penelitian dalam tulisan ini menggunakan Konstruktivisme ala Wendt, meskipun mengakui bahwa ‘teori’ Wendt yaitu ‘Konstruktivisme Sistemik’ masih cenderung ke dalam *state-centric*, namun penulis lebih ingin merevisi bahwa sejatinya Konstruktivisme dapat menjelaskan *non-state actor*, sehingga walaupun teori Wendt menuai kritikan, tidak langsung teori itu ditinggalkan. Teorinya mengenai sistem hubungan antar agen dari Hobbesian, Lockean, dan Kantian masih dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar kelompok Kurdi. Inilah yang berbeda dari penelitian kami dengan penelitian Cerny. Cerny terlalu fokus pada dekonstruksi teori HI dan teori konflik etnik sehingga dalam penjelasannya ia kurang mampu menjelaskan secara utuh bagaimana pola hubungan yang terjadi dan bagaimana ide-ide bersama yang tersebar menjadi penentu bagi interaksi antar kelompok Kurdi.

Michael Wuthrich di *Kurdish Nationalist Organizations, Neighboring States, and “Ideological Distance”* dalam Emil Tugdar dan Serhun Al (2018) menggunakan konsep *groupness* oleh

Brubaker dalam melihat hubungan antara kelompok kurdi, dan dengan “jarak ideologis” dari Mark Haas yang menjelaskan interaksi antara faksi-faksi Kurdi itu, bahwa semakin jauh jarak ideologi antar kelompok, semakin besar juga untuk menjadi ancaman. Namun dalam konsep tersebut, proses-proses identifikasi antar kelompok Kurdi tak dapat digambarkan. Konsep Brubaker seakan menjelaskan permukaan yang nampak, tanpa mengenal struktur-interaksi agen dalam sistem hubungan antara Kurdi. Konsep jarak ideologis itu juga secara sederhana hanya melihat dalam tataran ideasional tanpa melihat ranah materiil yang ada. Dalam penggunaan jarak ideologis juga seakan nampak memaksa dalam menjelaskan bagaimana KRG dapat berkerjasama dengan PKK-PYD hanya karena faktor kedekatan KRG tanpa melihat upaya komunikasi dan interaksi yang dibangun antar KRG dan PKK sendiri, artinya konsep itu terlalu mensimplifikasi sebuah kenyataan. Selain itu, ia juga mengabaikan *speech act* antar aktor-aktor Kurdi yang dalam Konstruktivisme mempunyai peran penting dalam melihat ide-ide yang menjadi titik simpul permasalahan.

Sedangkan tulisan Omer Tekdemir (2019) yang berjudul *The Social Construction of ‘Many Kurdishness’ : Mapping sub-identities of ‘EU-ising’*

Kurdish Politics, menjelaskan bagaimana sub-identitas yang beragam dari kelompok-kelompok Kurdi di Turki mengalami suatu konstruksi identitas politik Kurdi yang plural dalam lingkungan masyarakat demokratis dengan penuh kebebasan dan persamaan hak. Identitas politik ini memunculkan realitas sosial yang disebut Tekdemir sebagai ‘*many Kurdishnesses*’, representasi struktur sosial kontemporer Kurdi. Meski terdapat tiga sub-identitas utama, namun di antara identitas-identitas tersebut nilai-nilai budaya Kurdi menjadi titik sentral dalam masyarakat Kurdi yang majemuk. Yang menjadikan tulisan Tekdemir berbeda dengan penelitian ini, meskipun sama-sama menggunakan analisis Konstruktivisme, Tekdemir membatasi kajian pada kelompok-kelompok Kurdi yang berada di Turki saja, sedangkan penelitian yang akan dijelaskan dalam tulisan ini akan menganalisis kelompok Kurdi lintas negara yang mempunyai peran politik dan menjadi aktor serta dikaji dalam studi Hubungan Internasional. Utamanya KRG dan PKK/YPG.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teori (atau paradigma) Konstruktivisme digunakan dalam sebagai perangkat analisis untuk membedah permasalahan. Jika dalam proposisi Realisme dengan segala

variannya pasti menyatakan bahwa Negara adalah aktor tunggal, yang berarti menutupi kemungkinan kehadiran aktor lain, maka tidak sama halnya dalam Konstruktivisme. Negara dalam Realisme (dengan segala variannya) merupakan suatu yang terberi (*given*), dimana Konstruktivisme memandangnya sebagai konstruksi sosial. Maka aktor atau agen dalam hubungan internasional merupakan konstruksi sosial, yang tak selamanya berupa negara. di sinilah peran Konstruktivisme sebagai antitesis terhadap Realisme (dan positivisme secara umum).

Dalam dimensi ontologis dalam ranah Konstruktivisme, menurut Price dan Reus-Smit dalam Asrudin dan Suryana (2009), setidaknya ada proposisi-proposisi penting yang perlu diketahui. Proposisi pertama adalah struktur-struktur normatif atau ideasional itu sama pentingnya dengan struktur-struktur material. Dari struktur ideasional inilah kita dapat memaknai identitas para aktor. Proposisi yang kedua adalah bahwa identitas membentuk kepentingan dan tindakan. Dan yang ketiga, bahwa agen dan struktur diciptakan setara. Dengan kesetaraan tersebut, seperti yang dikatakan Wendt (1999) mengikuti strukturisasi Giddens, bahwa agen dan struktur *mutually constitutive*, atau bisa dibilang ‘melakukan hubungan timbal-balik’. Atau, dengan bahasa Chernoff (2007), bahwa identitas

dan kepentingan negara dan karakteristik dari sistem internasional mempengaruhi satu sama lain. Ia mempunyai istilah lain selain *mutually constituted*, yaitu *co-generative*. Agen dan struktur bersifat saling memperkuat satu sama lain. Dalam bahasa Hadiwinata (2017), norma, nilai budaya, dan simbol linguistik membentuk identitas, kepentingan dan intensi aktor, namun struktur tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya upaya para aktor yang mewujudkannya.

Konsep tentang identitas dan kepentingan dalam konstruktivisme berbeda dengan para Rasionalis, yang mengatakan bahwa identitas menyesuaikan diri dengan kepentingan. Namun tidak hanya identitas, konstruktivisme juga melihat pola interaksi yang dibentuk oleh beberapa unsur lain seperti norma, intensi, dan bahasa. Unsur-unsur tersebut penting dalam proses historis hubungan antar subjek (Hadiwinata, 2017).

Identitas menurut Wendt (1999), yang dia bawa menurut pengertian filosofis adalah *whatever makes a thing what it is.*, “apa saja yang membuat suatu hal itu menjadi “dirinya”. Dengan bahasanya sendiri ia mendefinisikan identitas sebagai “*a property of intentional actors that generates motivational and behavioral dis-positions*”. Identitas ini, lanjut dia, membutuhkan persamaan yang ada pada pemahaman atau pengertian

terhadap identitas tersebut dari masing-masing aktor sehingga menghasilkan *intersubjective meaning*. Sedangkan menurut Alexandrov (2003), kebanyakan konstruktivis mendefinisikannya sebagai *socially shared beliefs*, atau kepercayaan/perasaan sosial yang dimiliki bersama.

Menurut Wendt dalam Telhami dan Barnett (2003) disebutkan, identitas nasional diartikan sebagai kelompok masyarakat yang beraspirasi dalam sebuah tanah air, mempunyai kenangan sejarah bersama, mempunyai hak atau tugas yang legal untuk semua anggota, dan punya tanda yang dapat membedakan diri mereka dengan yang lain. Faksi-Faksi Kurdi inilah yang penulis pandang sebagai kelompok yang memiliki kekuatan identitas tersendiri, hingga akhirnya identitas itu berpengaruh pada perilaku politiknya. Identitas Kurdi sebenarnya telah lama terbangun dan terbentuk sepanjang sejarah. Baik Kurdi yang berada di Irak, Iran, Turki maupun Suriah. Bahkan dimulai sebelum masa kolonialisme. Ketika identitas Arab, Turki, maupun Iran muncul, bersamaan itu pula identitas Kurdi bangkit, namun identitas itu terbagi-bagi di antara negara-negara yang mengelilinginya.

Wendt yang sangat terpengaruh oleh teori strukturasi Anthony Giddens, melihat agen-struktur itu bukan merupakan

sebuah dualitas, namun bersifat dialektis. Agen memang mempunyai kemampuan kebebasan yang luas, namun tidak ada agen yang bersifat otonom. Ia tetap dapat terkonstruksi oleh struktur yang ada (Lubis, 2018). Jika agen/aktor dalam teori Wendt masih bersifat *state centric*, maka dalam kajian dalam hubungan antar Kurdi ini aktor non negara diangkat sebagai agen. Karena kelompok-kelompok non negara ini mempunyai interaksi yang telah lama dibangun, dan membentuk pola tertentu, sehingga tercipta struktur khas dalam jangkauan antar Kurdi, selain adanya struktur dalam skala internasional/global. Aktor non negara ini berbeda bentuk dan perannya dengan selama ini yang dikaji dalam Hubungan Internasional, karena selama ini aktor non negara biasanya dikaji dalam lingkup transnasional yang berupa *Multi National Corporation* (MNC), *Non Governmental Organization* (NGO), ataupun *Transnational Social Movement* (TSM) di mana lebih bergerak dalam hal ekonomi, advokasi, jaringan, dan gerakan sosial, bukan sebuah entitas politik (Soetjipto, 2018).

Tak seperti keseluruhan meta-teori Realis, Konstruktivisme memberi posisi yang lebih strategis bagi aktor non negara sebagai pembuat kebijakan luar negeri. Konstruktivis memang mengakui bahwa *state* merupakan aktor yang penting,

namun Konstruktivisme tidak menyatakan unit analisis tertentu dalam studi hubungan internasional (Reus-Smit dan Snidal, 2008). Wendt sendiri sejatinya lebih memilih untuk fokus ke negara (dengan konsep Antropomorfisme-nya), meskipun dia mengakui bahwa Aktor non negara secara meningkat memainkan peran penting dalam politik dunia. Namun pandangan Wendt ini mendapat kritikan dari Konstruktivis lainnya, seperti Inayatullah dan Blaney yang menganggap bahwa teori Wendt, seperti Waltz, adalah konservatif dan mentahbiskan adanya *inter-state system*. Begitu juga kritikan yang datang dari Reus-Smit dan Hall (Carlsnaes dkk., 2013). Artinya, kritikan tersebut menunjukkan Konstruktivisme yang tidak *saklek* menempatkan (hanya) negara sebagai agen.

Dalam Konstruktivisme, Nicholas Onuf mengembangkan teori tentang *speech acts*, yaitu sebuah tindakan ucapan yang menjembatani realitas material dan sosial. Dengan adanya *speech acts*, motivasi dan intensi suatu aktor dapat diketahui. Tindakan ucapan tersebut mempunyai kekuatan konstitutif dalam hubungannya mengkonstruksi realitas. Onuf mengkategorikan *speech acts* menjadi tiga jenis, yaitu *assertive*, *directive*, dan *commisive* (Asrudin dkk., 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok-Kelompok Kurdi

Masyarakat Kurdi tersebar di empat negara yaitu Turki, Iran, Irak, dan Suriah. Kurdi merupakan suku bangsa terbesar yang tak memiliki negara sendiri yang berdaulat (Gunter, 2008). Bangsa Kurdi membentuk sekitar 10 persen dari populasi Iran (8,1 juta jiwa), 17,5 persen di Irak (5,5 juta jiwa), 9,7 persen di Suriah (1,7 juta jiwa), dan 18 persen di Turki (14,7 juta jiwa) (Council of Foreign Relations: 2017). Keadaan terpecahnya Kurdi itu dikarenakan pembagian negara-negara pemenang Perang Dunia I setelah usul pendirian negara Kurdi di perjanjian Sevres tahun 1920 gagal diwujudkan (Neriah, 2012).

KRG pada awalnya terbentuk dari dua partai politik yang dalam sejarahnya merupakan rival dan beberapa kali pernah bertempur yaitu Partai Demokratik Kurdi (KDP) yang didirikan Mustafa Barzani pada 1946 dan Partai Patriotik Kurdistan (PUK) yang didirikan Jalal Talabani di tahun 1975 (Lortz, 2005). KRG terbentuk secara *de facto* di masa Saddam Husain. Perseteruan antara KDP dan PUK pada akhirnya menimbulkan eskalasi politik dan perang saudara sejak 1994 hingga berakhir ketika diadakan perjanjian gencatan senjata di Washington tahun 1998. Dari perjanjian tersebut, KDP mendapatkan penguasaan atas daerah Erbil dan Dohuk

sedangkan PUK memerintah di daerah Sulaymaniyah (Romano, 2006). Kedua partai itu baru benar-benar bisa berdamai ketika mereka sepakat untuk membentuk pemerintahan bersatu KRG pada 2006 (Devigne, 2011). Tidak hanya sebagai partai politik, kedua kelompok itu juga mempunyai pasukan bersenjata bernama Peshmerga yang nantinya juga difungsikan sebagai angkatan bersenjata KRG (Romano, 2006).

KDP dan PUK menjadi partai yang mendominasi dan paling berpengaruh di Kurdistan Irak. Secara politik, KDP dan PUK yang masing-masing dipimpin oleh Massoud Barzani dan Jalal Talabani menjalankannya dengan sistem tribalisme yang berpusat dari kedua tokoh tersebut. Tribalisme dari kedua partai ini telah lama terbentuk dan berlangsung di dalam panggung politik Kurdistan Irak. Klan Barzani mendominasi KDP dan begitu pula klan Talabani yang menjadi basis bagi PUK (Danish Immigration Service, 2016). Sejarah berdirinya KDP dimulai ketika Mustafa Barzani pada 1946 ketika ia bersama-sama kelompok militannya bergerilya di Irak maupun di Iran untuk membentuk barisan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Pada 1975 Jalal Talabani setelah diasingkan akibat persaingan dengan pemimpin KDP lainnya membentuk PUK. PUK sendiri akhirnya mempunyai basis dan pengaruh di wilayah

Kurdistan Irak yang berdialek Sorani sedangkan KDP pada wilayah yang berdialek Kurmanji. Kurdistan Irak sebelah selatan merupakan wilayah yang menggunakan bahasa Kurdi dialek Sorani sedangkan di sebelah utara bahas Kurdi dialek Kurmanji menjadi yang dominan di sana. Perbedaan ciri lain yaitu massa KDP yang dalam tarekat mengikuti aliran Qadiriyyah sedangkan aliran Naqsyabandiyah diikuti oleh massa PUK (Romano, 2006).

Wilayah Erbil dan Dohuk yang dikuasai KDP sementara Sulaymaniyyah oleh PUK ini juga merupakan akibat perbedaan basis massa pendukung dari logat bahasa Kurdi yang berbeda, di mana masyarakat Erbil dan Dohuk ini berbahasa Kurdi Kurmanji sedangkan di Sulaymaniyyah berbahasa Kurdi Sorani. Perbedaan antara KDP dan PUK berkisar pada ikatan keluarga/klan tertentu, geografi, dan rivalitas yang lama, sedangkan dalam ideologi, tak ada perbedaan yang jelas diantara keduanya. Yang menarik, hal ini juga berdampak pada afiliasinya di Iran. KDP-I lebih banyak mempunyai massa di daerah Kurdistan berbahasa Kurmanji seperti di Mahabad dan Urumiya, sedangkan kelompok Komala mempunyai pengaruh besar di daerah Kurdistan berbahasa Sorani seperti di Sanandaj dan Zaqqish (Bernard dan Schnapper-Casteras, 2010).

Dalam segi agama, sebagian besar Kurdi di Irak menganut Sunni mazhab Syafi'i dan terdapat pula minoritas Syi'ah. Selain itu, terdapat pula kelompok minoritas sekte Yazidi yang berada di pegunungan Sinjar, dekat dengan perbatasan Irak – Suriah (Bruinessen, 2000). Sedangkan dalam segi bahasa yang dipakai, bahasa Kurdi dialek Sorani dan Kurmanji. Dialek Kurmanji digunakan sekitar 20-25 persen, dan sisanya, atau minoritas, dialek Sorani. Dialek Kurmanji digunakan secara luas di daerah provinsi Dohuk dan Erbil, sedangkan Sorani di provinsi Sulaimaniyah (Sheyholislami, 2011).

Sementara PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) atau Partai Pekerja Turki didirikan Abdullah Ocalan pada 27 November 1978 di sebuah desa kecil dekat Diyarbakir (Ocalan, 2009). Pada awalnya, menggunakan ideologi Marxis-Leninis sebagai motor penggerak dan dengan begitu memperoleh basis pendukung dari masyarakat pedesaan dan kaum proletar Kurdi (Heper, 2007). Namun terdapat perubahan ideologi yang disampaikan Ocalan pada teks pembelaan ketika sidang di Athena pada 2003, di mana Ocalan (2011) menyatakan bahwa dia tidak lagi menuntut kemerdekaan Kurdi, tetapi lebih mewacanakan sebuah republik yang (benar-benar) demokratis di Turki. Sebuah tuntutan yang memang mengejutkan

dimana PKK pada awalnya didirikan untuk menuntut kemerdekaan Kurdistan, tetapi kemudian lewat pernyataannya itu, Ocalan malah menolak kemerdekaan bagi Kurdi dan selanjutnya “menguatkan dan mempertahankan” Turki dengan sistem (yang lebih) demokratis. Sebuah keputusan yang sama sekali berbeda dan terbalik 180 derajat.

Dalam pernyataan selanjutnya, Ocalan mencanangkan sistem republik demokratis ini dalam salah satu rancangan (*project*) dari sebuah ide yang akan dia usulkan, yaitu sebuah konsep demokrasi radikal, yang bermaksud untuk berusaha mengembangkan demokrasi seutuhnya secara total di setiap bagian dari bangsa dan negara. Rancangan satunya lagi adalah konfederalisme demokratis (*democratic confederalism*), yang dijelaskannya sebagai sebuah model pemerintahan sendiri yang bersifat demokratis (*democratic self-government*). Ocalan selanjutnya mengatakan bahwa rancangan tersebut akan membangun komunitas lokal yang berpemerintahan sendiri dan diatur melalui pembentukan dewan terbuka, dewan kota, parlemen lokal, dan kongres yang lebih besar. Rakyat Kurdi sendiri lah yang menjadi wakil dari pemerintahan otonom ini, bukan berdasarkan pada wewenang negara (untuk menentukan siapa wakil-wakilnya)” (Casier dan Jongender, 2011). PKK dianggap dan

masuk dalam daftar organisasi teroris oleh Turki dan Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya (Paasche, 2015). Jika KRG mempunyai pasukan bersenjata yaitu Peshmerga, maka PYD mempunyai *People's Protection Unit* (YPG) sebagai pasukan milisi (Malmvig dan Rojan, 2014). Selain kedua kelompok Kurdi tersebut, terdapat kelompok-kelompok Kurdi kecil lainnya.

Kedua kelompok ini, mempunyai sejarah permusuhan dan peperangan antara mereka, bermula semenjak KDP melihat PKK sebagai kelompok pengganggu hingga akhirnya kelompok Kurdi Irak tersebut bersekutu dengan Turki untuk memerangi partai pimpinan Ocalan itu di dekade 90-an. PUK di tahun 2000-an juga mengangkat senjata untuk melawan PKK (Romano, 2006).

Struktur Hubungan antar Kelompok Kurdi

Hubungan antara KRG dan PKK bukanlah karena pertimbangan kepentingan unsur material semata seperti yang digaungkan oleh Neo-Realisme, melainkan dibentuk oleh unsur-unsur seperti norma, identitas, intensi, dan bahasa. Meskipun KRG dan PKK punya identitas yang berbeda jika ditarik pada karakteristik identitas masing-masing ideologinya, namun kedua kelompok ini mempunyai identitas Kurdi yang sama.

Kedua kelompok sama-sama mempunyai basis dan memperjuangkan masyarakat Kurdi.

Dalam Konstruktivisme, konstruksi sosial bukanlah realitas objektif yang tunggal, tetapi suatu produk multi bentuk yang sesuai dengan konteks yang ada. Berbeda dengan pandangan positivitas yang melihat realitas di dunia ini bersifat konstan, ajeg, dan pasti, Konstruktivis berpendapat bahwa semua bentuk hubungan antar aktor baik dengan peperangan atau perdamaian itu merupakan bersifat saling menjadi (*becoming*), bukan terberi (*given*) (Hadiwinata, 2017). Begitu pula interaksi antar KRG dan PKK yang terus menerus berlangsung hingga kita tidak dapat menentukan suatu kondisi pasti dalam hubungan antar dua aktor tersebut. Antara aktor saling mengalami proses ‘pembelajaran’ yang berakibat juga pada suatu proses bagaimana struktur atau sistem hubungan mereka bisa menyesuaikan akibat perubahan yang diakibatkan oleh agen.

Struktur dibentuk oleh ide-ide, norma, bahasa, yang dapat mempengaruhi aktor. Baik yang bersifat regulatif, tetapi juga konstitutif. Dari situ, aktor dapat terus memperbarui definisi kepentingan melalui proses interaksi (Hadiwinata, 2017). Struktur yang terus dibentuk oleh kelompok-kelompok Kurdi utamanya

KRG dan PKK menjadikan penentu bagi pergerakan dan kebijakannya dan kedua kelompok tersebut saling berinteraksi satu sama lain sehingga juga mempengaruhi struktur antar Kurdi tersebut. Struktur yang ada pada masa dahulu tentunya berbeda dengan sekarang.

Penting untuk diketahui bahwa struktur hubungan antar aktor dalam hal ini Kurdi, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba lahir dan telah menjadi “barang jadi”, namun telah mengalami proses salah satunya karena terbentuk akibat struktur-struktur internasional pada masanya dan kondisi latar belakang yang memengaruhinya. Kelompok-kelompok Kurdi di masa awal pergolakan hingga sebelum tahun 2000an, benar-benar menjadi “kanker” dalam keempat negara yang menaunginya. Artinya, kelompok-kelompok Kurdi memosisikan dirinya sebagai kelompok separatis dan musuh negara, serta tidak mempunyai pengakuan.

Pada awal abad 21, setelah Ocalan ditangkap dan ia merubah ideologi PKK yang tak lagi mendeklarasikan perjuangan untuk memisahkan Kurdi dari Turki, kemudian pada 2005 tercapai kesepakatan dalam Konstitusi Iraq untuk mengakui entitas otonomi Kurdi, maka secara perlahan terjadi proses kontruksi ulang pada struktur baik hubungan Kurdi dengan aktor internasional, lebih-lebih pada lingkup antar Kurdi utamanya antar dua

kelompok besar, KRG dan PKK. Jika dahulu antara KRG dan PKK struktur hubungan cenderung penuh dengan permusuhan dan peperangan, maka pada masa sekarang lebih kepada ‘sekadar’ rivalitas.

Konstruksi ulang pada struktur hubungan tersebut dimulai dari interaksi-interaksi yang dilakukan antara KRG dan PKK yang intensinya semakin tinggi semenjak adanya *Arab Spring*. Musim Semi Arab tersebut, yang menyebabkan kedaulatan negara menjadi lemah seperti yang ada pada Irak dan Suriah, menyebabkan batas-batas internasional menjadi kabur. Apalagi sejak adanya ISIS yang memporak-porandakan batas-batas warisan sistem Westphalia itu. Akibat lemahnya kedaulatan negara, maka keterbukaan arus barang dan orang lintas batas menjadi lebar, dan interaksi-interaksi yang dilakukan antar kelompok menjadi tinggi.

Begitu juga interaksi yang dilakukan antar KRG dan PKK, adanya Perjanjian Erbil pada 11 Juni 2012 yang menghasilkan tujuh butir kesepakatan. Pada butir pertama, disebutkan : “Pembentukan Komite Tinggi Bersama dari kedua dewan untuk kerja sama kerja politik dan diplomasi sebagaimana dalam mempersatukan tujuan politik....yang berbasis nilai-nilai abadi rakyat Kurdi sebagai suatu bangsa dan etnis di Suriah...”

(Kurduwatch, 2012). Masing-masing kelompok menyepakati identitas bersama Kurdi mereka sebagai titik temu atas identifikasi mereka. Identifikasi ini penting, karena dari proses ini, maka mereka akan saling mengetahui bagaimana sikap masing-masing mereka terhadap *other* (liyan). Selanjutnya, dari interaksi tersebut, maka setiap kelompok/aktor akan menghasilkan sebuah pemaknaan terhadap lainnya (Zehfuss, 2004).

Meski perjanjian itu gagal, namun proses interaksi terus berlangsung lebih-lebih ketika mereka menghadapi ISIS, di mana pasukan KRG dan PKK dalam satu front untuk memerangi pasukan teror tersebut. Kemudian ketika kesepakatan mereka dilanjutkan Perjanjian Duhok untuk menyatukan politik mereka dalam menyelamatkan Kurdi dari ancaman luar. Terbukti setelah adanya kesepakatan itu, tak lama kemudian pasukan Peshmerga dari KRG dikirim ke Kobane. Interaksi berlanjut ketika Turki menyerang Afrin, salah satu kanton Rojava di barat laut Suriah, KRG mengirimkan utusan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke sana. Dengan Interaksi-interaksi tersebut akan menghasilkan identifikasi positif satu sama lain dan terjadi *intersubjective understanding* di antara mereka.

Wendt mengungkapkan bahwa terdapat tiga karakteristik dalam sistem internasional. Pertama yaitu Hobbesian, di

mana aktor saling bermusuhan. Kedua Lockean, yaitu sebuah rivalitas yang ditunjukkan antar aktor. Dan ketiga ialah Kantian, suatu sistem yang memperlihatkan sebuah kerja sama. Hubungan antar aktor bisa berganti-ganti dari sistem satu ke sistem yang lain (Wendt, 1999). Semenjak Ocalan mengubah ideologi PKK menjadi *democratic confederalism* dan KRG semakin diperkokoh dengan pengakuan terhadap entitas tersebut pada konstitusi 2005, sistem hubungan antar kedua kelompok tersebut lebih cenderung berganti dari Hobbesian yang telah banyak menyedot waktu dengan peperangan, ke Lockean yang bernuansa rivalitas atau persaingan.

Sistem hubungan tersebut pernah sempat menjadi Kantian ketika antara KRG dan PKK bekerja sama dalam memerangi ISIS di Irak dan Suriah. Dalam rumusnya, Wendt mengasumsikan bahwa perubahan dari Lockean ke Kantian diperlukan *master variables* atau variabel utama yang terdiri dari interdependensi (ketergantungan), perasaan sepenanggungan, dan homogenitas atau kesamaan identitas (Wendt, 1999). Kedua belah pihak ini meskipun saling memusuhi, nyatanya saling bergantung satu sama lain atas peran penyangga layaknya *buffer state* terhadap negara-negara yang mengurungnya, meskipun

juga sering menyebabkan hubungan yang konflikual di antara mereka. Interdependensi akhirnya terlihat ketika antara KRG dan PKK bahu-membahu bekerja sama dalam menumpas ISIS di sempadan Kurdistan.

Sedangkan variabel perasaan sepenanggungan terlihat dengan membutuhkan pihak ketiga untuk membuat dua pihak dalam satu kelompok (Wendt, 1999). Adanya ISIS yang mengancam membuat KRG dan PKK dalam satu barisan bahu membahu dalam memerangi ISIS. PKK membantu KRG di daerah sekitar Kirkuk dan Sinjar, sementara KRG mengirim Peshmerga ke Kobane. Sementara homogenitas pada KRG dan PKK jelas akan merujuk pada kesamaan etnisitas kedua kelompok itu. Etnisitas ini mencakup sosial-budaya dan geografis Kurdistan yang sama.

Sistem hubungan Lockean terlihat ketika antara kedua kelompok tersebut bersaing dalam merebut pengaruh di Rojava di mana KNC dan PYD saling berebut untuk berkuasa di sana. Kemudian ketika KRG dan PKK berkonflik untuk merebutkan daerah Sinjar setelah daerah itu dibebaskan dari ISIS. KRG juga masih menyerukan kepada PKK untuk pergi dari wilayah Gunung Qandil di perbatasan Irak –Turki-Iran karena dianggap merugikan Kurdi Irak akibat serangan-serangan Turki yang disasar di wilayah tersebut.

Namun ketika menyangkut tentang identitas Kurdi yang diusik, kedua kelompok tersebut sama-sama memperlihatkan hubungan yang positif. Ketika Turki mulai menyerang Afrin, salah satu kanton Rojava yang dikuasai PYD, maka KRG melalui Presiden Masoud Barzani menyerukan untuk Operasi Ranting Zaitun itu dihentikan dengan segera. Delegasi dari KRG juga dikirimkan ke Afrin guna melihat keadaan dan pada akhirnya memutuskan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke sana. Ketika Turki menggelar Operasi Mata Air ke Rojava, maka KRG meresponnya dengan kritikan seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Masrour Barzani. Parlemen KRG sendiri mengeluarkan statemen agar Turki menghentikan kampanye militernya di Rojava. Pemimpin YPG Mazlum Kobane juga berterima kasih kepada KRG atas dukungan terhadap mereka. Beberapa analisis politik mengatakan bahwa invansi Turki ke utara Suriah itu dapat menimbulkan solidaritas dan sentimen persatuan nasional Kurdi (Zaman, 2019).

Meskipun PKK ataupun YPG merupakan rival KRG, dan Turki mempunyai hubungan baik dengan KRG atas investasi ekonomi yang diberikan, tetapi hal itu tidak otomatis menimbulkan dukungan KRG atas kampanye militer yang dilancarkan Turki ke Rojava yang secara politis dapat menguntungkan KRG,

namun sebaliknya, KRG malah memperlihatkan perhatian dan kecemasan serta menyerukan dihentikannya serangan Turki tersebut. Artinya, kepentingan materi yang didapatkan KRG akibat serangan Turki pada Rojava yang dikuasai PYD seperti yang berlaku jika memakai paradigma positivisme terbantahkan.

Walaupun hanya lewat pernyataan, namun dukungan KRG terhadap PKK yang kemudian direspon baik adalah penting bagi interaksi antar agen Masoud Barzani juga pernah menyatakan bahwa PKK bukanlah organisasi teror seperti yang dinyatakan Turki atau Barat (Ekurd, 2008). Lalu pernyataan Perdana Menteri KRG Nechirvan Barzani bahwa “semua Kurdi harus bersatu dalam mempertahankan tanah airnya”. Lalu ketika Mazloum Kobani mengutarakan apresiasi dan terimakasihnya pada masyarakat Kurdi di KRG karena telah mendukung Rojava selama penyerangan Turki di wilayah tersebut merupakan hal yang tak boleh diabaikan.

Pernyataan dukungan dan wacana-wacana Kurdi yang diangkat juga berpengaruh pada apa yang disebut sebagai komunikasi simbolik atau yang disebut bahasa di Konstruktivisme. Menurut Hadiwinata (2017), komunikasi simbolik seperti pernyataan yang mengandung kepentingan, intensi, dan

identitas merupakan “bahan mentah”. Berbeda dengan “bahan jadi” seperti dokumen yang telah mengalami penyederhanaan, “bahan mentah” ini mengandung otentisitas dan originalitas tinggi. Pernyataan dari para tokoh aktor merupakan yang disebut dalam Konstruktivisme sebagai *speech act*. Maka ide-ide, nilai-nilai, identitas, dan intensi tentang Kurdi dapat dilihat dari *speech act* tersebut, dan penting untuk melihat interaksi antar Kurdi.

KESIMPULAN

Hubungan antar kelompok Kurdi dalam Hubungan Internasional mempunyai karakteristik yang menarik karena biasanya *non-state actor* dalam kajian HI lebih kepada NGO, kelompok transnasional dan teror yang tidak bisa disamakan dengan negara. Sedangkan dalam konteks ini, kelompok Kurdi membentuk suatu entitas yang mirip dengan suatu pemerintahan dan bentuk pengejawantahan dari *Post-Westphalian state* atau biasa juga disebut sebagai *pseudo state*. Entitas ini menemukan perhatian internasionalnya khususnya dalam wilayah Timur Tengah yang sedak bergejolak. Maka penelitian ini mengungkapkan bagaimana Konstruktivisme dapat menjelaskan atau setidaknya memahami interaksi antar non-

state actor dalam kajian Hubungan Internasional.

Kelompok Kurdi, yang diwakili utamanya oleh KRG dan PKK dari dulu telah mengalami hubungan permusuhan. Ini disebabkan perbedaan ideologi serta adanya kepentingan negara lain untuk semakin memperkeruh permusuhan ini. KRG digunakan Turki untuk menghadapi PKK. Hubungan antara dua kelompok tersebut juga berkembang ke wilayah lain terutama di Rojava dengan masing-masing mempunyai kelompok afiliasi yang saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Namun hubungan antar keduanya sedikit demi sedikit terlihat berubah dari permusuhan yang mencoba menganalisis satu sama lain menjadi ‘hanya’ sebuah rivalitas sejak awal 2000-an, di mana peperangan dengan melibatkan kontak senjata secara langsung antara KRG dan PKK mulai dihindari.

Melalui kacamata Konstruktivisme, hubungan itu bisa dilihat dengan melihat agen atau aktor saling berinteraksi dan melalui proses ‘sosialisasi’ terus menerus, sehingga dapat mengubah struktur yang ada dan dari struktur tersebut juga bisa menentukan tindakan aktor. PKK semenjak perubahan ideologinya dan KRG semenjak mempunyai pengakuan konstitusional telah saling menyesuaikan hingga menciptakan struktur yang sesuai dengan konteks kondisi yang ada. Sistem hubungan tersebut berubah dari Hobbesian

menjadi Lockean. Adanya ISIS sempat menjadikan hubungan tersebut menjadi Kantian dengan adanya kerja sama. Identitas Kurdi juga mempunyai peran penting bagi pembentukan tindakan. Lewat *speech act* para tokoh aktor, ide-ide, norma, identitas, akan bisa terlihat dan interaksi yang terus berlanjut antara keduanya akan menentukan bagaimana hubungan dua kelompok tersebut ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrudin, Mirza Jaka Suryana (eds.). (2009). *Refleksi Teori Hubungan Internasional: Dari Tradisional ke Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bruinessen, Martin van. (2000). *Mullas, Sufis and Heretics: The Role of Religion in Kurdish Society*. Istanbul: The Isis Press.
- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, & Beth A Simmons (eds.). (2013). *Handbook of International Relations*. London: SAGE.
- Casier, Marlies, Joost Jongerder (eds.). (2011). *Nationalisms and Politics in Turkey: political Islam, Kemalism, and the Kurdish Issue*. New York: Routledge.
- Cerny, Hannes. (2008). *Iraqi Kurdistan, PKK, and International Relations : Theory and Ethnic Conflict*. New York: Routledge.
- Chernoff, Fred. (2007). *Theory and Metatheory in International Relations: Concept and Contending Actions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gunter, Michael M. (2008). *The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey*. New York, Palgrave Macmillan.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Buku Obor.
- Heper, Metin. (2007). *The State and Kurds in Turkey: The Question of Assimilation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Natali, Denise. (2010). *The Kurdish Quasi-State : Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq*. New York: Syracuse.
- Ocalan, Abdullah. (2009). *War and Peace in Kurdistan: Perspectives for a Political Solution of the Kurdish Question*. Cologne: International Initiative,
- _____. (2011). *Democratic Confederalism*. London: International Initiative.
- Romano, David. (2006). *The Kurdist Nationalist Movement: Oportunity, Mobilization, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sheyholislami, Jaffer. (2011). *Kurdish Identity, Discourse, and New Media*. New York : Palgrave Macmillan.
- Soetjipto, Ani, dkk. (2018). *Transnasionalisme: Peran Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Telhamy, S. and Barnett, M. (eds.). (2002). *Identity and Foreign Policy in the Middle East*. Itacha: Cornell University Press.
- Torelli, M. (ed.). (2016). *Kurdistan an Invisible Nation*. Milano: ISPI.
- Tugdar, Emel Alif dan Serhun Al (eds.). (2018). *Comparative Kurdish Politics in the Middle East: Actors, Ideas, and Interest*. Cham: Springer Nature.
- Wendt, Alexander. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Pressm.
- Wendt, Alexander, Jack Levy, Richard Little, dkk. (2014). *Metodologi Ilmu*

Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif. Malang: Intrans.

Zehfuss, Maja. (2004). *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality.* Cambridge: Cambridge University Press.

Tesis

Bosch, Kristen Menje. (2015). *How the Expansion of the Islamic State Influences the Peace Process between Turkey and the PKK and How it Affects the Prospects of an Independent Kurdish State.* Master Thesis, Utrecht University. <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/320424> diakses 1 Mei 2019.

Ham, Garrison Sidney Cleophas. (2016). *Halting ISIS: Kurdish Military Resistance Against the Islamic State.* Tesis. San Fransisco State University. <https://sfsu-dspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.3/187165/AS362016POLIH36.pdf?sequence=1> diakses 4 Maret 2019.

Lortz, Michael G. (2005). *Willing to Face Death: A History of Kurdish Military Forces - the Peshmerga - From the Ottoman Empire to Present-Day Iraq.* Tesis. <http://diginole.lib.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3203&context=etd> diakses 8 September 2019.

Jurnal, Artikel dan Situs Online

Alexandrov, Maxym. (2003). "The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis". *Journal of International Development and Cooperation*, 10(1), <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.2088&rep=rep1&type=pdf>. diakses 29 April 2019.

Ali, Othman. (2014). "The Implications of the War on ISIS in Kurdistan".

Orsam Review of Regional Affairs, 10.

http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/201495_policybrief10ing.pdf diakses 24 Juli 2019.

Bozarslan, Hamit. (2015). "The Kurds and Middle Eastern "State of Violence" the 1980s and 2010s". *Kurdish Studies*, 2(1). <http://www.tplondon.com/journal/index.php/ks/article/viewFile/349/280> diakses 1 Agustus 2019.

Chomani, Kamal. (2015). KRG,PKK Make Unlikely Allies as They Battle IS Together. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/pkk-krp-peshmerga-join-forces-fight-islamic-state.html#ixzz3e2jaOC2x> diakses 4 Juli 2019.

Council on Foreign Relations, (2015). The Time for the Kurds. <https://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/?cid=soc-at-the-time-of-the-kurds-infoguide> diakses 29 Oktober 2019.

Devigne, Jacqueline. (2011). "Iraqoncilable" Differences? The Political Nature of the Peshmerga. http://tiqlarchives.org/sites/default/files/resources/nimep/v5/NIMEP_Insights_2011_48-64.pdf diakses 7 Juni 2019.

Ekurd. (2015). PKK and KDP, There's Drama Between Kurdistan's Two Best Frenemies. <http://ekurd.net/pkk-and-kdp-theres-drama-between-kurdistsans-two-best-frenemies-2015-02-12> diakses 9 Juli 2019.

Ekurd Daily. (2008). Iraqi Kurdistan President Says PKK is not a 'Terrorist' Organization. <http://ekurd.net/mismas/articles/misc2008/6/independentstate2261.htm> diakses 17 Juni 2019.

Gunter, Michael M. (2015). "The Kurds in the Changing Political Map of the Middle East". *Kurdish Studies*, 3(1). <http://www.tplondon.com/journal/in>

- dex.php/ks/article/viewFile/429/395 diakses 25 Maret 2019.
- Gunter, Michael M. (2015). "The Kurds in the Changing Political Map of the Middle East". *Kurdish Studies*, 3(1). <http://www.tplondon.com/journal/in dex.php/ks/article/viewFile/429/395> diakses 8 Oktober 2019.
- International Crisis Group. (2013). "Syria's Kurds, A Struggle Within a Struggle". *Middle East Report*. <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/136-syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.pdf> diakses 9 Oktober 2019.
- Orhan, Mehmet. (2014). "Transborder violence: the PKK in Turkey, Syria and Iraq". *Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and Genocide*, Routledge, 7(1), <http://dx.doi.org/10.1080/17467586.2014.909946> diakses 23 November 2019.
- KurdWatch. (2012). Cooperation Agreement Between the People's Council of West Kurdistan and the Kurdish National Council. www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_D027_en_ar.pdf diakses 1 Juli 2019.
- Lubis, Akhyar. (2018). *Modernitas Radikal Adalah Upaya Anthony Giddens Melepaskan Diri dari "Subyektivisme" Versus "Obyektivisme"*, Bahan Kuliah.
- Malmvig, Helle, dan Hetav Rojan. (2014). *A Difficult Balancing Act: Backing the Kurds in the fight against IS in Iraq and Syria*. Danish Institute for International Studies (DIIS) Policy Brief. http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2014/diispbbacking_the_kurds_print.pdf diakses 17 Mei 2019.
- Middleeastmonitor. (2014). Syrian Kurds provide Iraq's Peshmerga support against ISIS. <https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/13236-syrian-kurds-provide-iraqs-peshmerga-support-against-isis> diakses 30 Juli 2019.
- Neriah, Jacques. (2012). "The Future of Kurdistan: Between Turkey, the Iraq War, and the Syrian Revolt". *Jerusalem Center for Public Affairs* <http://jcpa.org/article/the-future-of-kurdistan-between-turkey-the-iraq-war-and-the-syrian-revolt/> diakses 21 Mei 2019.
- Paasche, Till F. (2015). "Syrian and Iraqi Kurds: Conflict and Cooperation." *Middle East Policy*, 22(1). <http://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mepo.12114/full> diakses 5 September 2019.
- Tekdemir, Omer. (2019). "The Social Construction of 'Many Kurdishness': Mapping sub-identities of 'EU-ising' Kurdish Politics". *Ethnicities*, 19(5). <https://doi.org/10.1177%2F1468796818786320> diakses 17 Oktober 2019.
- Rudaw. (2015). "Iraqi Kurdish Presidency Congratulates YPG on Tal Abyad Liberation". <https://www.rudaw.net/english/kurdistan/160620153> diakses 24 Agustus 2019.
- Danish Immigration Service. (2016). "The Kurdistan Region of Iraq (KRI): Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation", *Fact Finding Report* https://www.nyidanmark.dk/NR/rdo_nlyres/4B4E8C12-84B7-4ACB-8553-5E0218C5689A/0/Factfindingreport_KurdistanRegionofIraq11042016.pdf diakses 22 Agustus 2019.
- Rudaw. (2015). "Peshmerga-YPG Drive out ISIS from Rojava Border Area" <http://rudaw.net/english/kurdistan/240220151> diakses 5 Juli 2019.